

BAB V

KESIMPULAN

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak tepat di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara samudra Pasifik dan samudra Hindia, sehingga negara-negara maju mengekskspansi sumber daya alam yang terdapat di wilayah perairan Indonesia secara ilegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah praktek pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia.

Potensi sumber daya perikanan yang besar di perairan Indonesia, pengawasan yang lemah di perairan perbatasan (antara lain sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas dan sarana pengawasan armada kapal patroli Indonesia), kebutuhan ikan yang tinggi di luar negeri, dan belum terlaksananya kerja sama bilateral secara optimal antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di

kawasan dalam hal penanganan *illegal fishing*, telah mendorong terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Secara geografis, luas wilayah laut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dikelola. Namun, dalam dekade 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan dari kegiatan penangkapan ikan dilaut yang dilakukan secara illegal oleh kapal asing yang sangat merugikan Indonesia.

Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut diwilayah Indonesia yang berlebihan akan mengganggu ekosistem perikanan dibawah laut serta lingkungan perairan sekitar. Pertumbuhan dan pertambahan kerusakan lingkungan (*environmental disasters*) yang terjadi dilaut telah mencapai dimensi regional dan terus berdampak secara dramatis

Dari hasil penelitian, penulis memakai teori diplomasi multilateral dengan melakukan berbagai konferensi-konferensi untuk membuat berbagai macam kerjasama maupun kesepakatan untuk menanggulangi kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan melakukan konferensi *ASEAN Maritime Forum* (AMF). Asia Tenggara dipandang sebagai kawasan strategis dimana, Asia tenggara memiliki jalur pelayaran perdagangan internasional yang memiliki nilai ekonomi lebih. Karena banyaknya lalu lintas pelayaran yang melewati jalur itu, menjadikan jalur ini rawan akan kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan senjata, drug, dan human trafficking. *ASEAN Maritime Forum* (AMF) yang merupakan salah satu pilar utama pembentukan ASEAN community menjadi

penting untuk mengatasi isu kejahatan transnasional.

Kesadaran dan kebersamaan ASEAN wajib ditumbuhkan untuk menjaga dan menciptakan kawasan yang bebas, damai dan aman. Isu kejahatan transnasional yang meluas kebeberapa aspek, memberi dampak bagi kelangsungan hubungan bilateral negara ASEAN karena ancaman tersebut tidak hanya mempunyai arti finansial yang besar namun, ada unsur politik yang dilakukan oleh non state actor juga berperan disitu, dengan adanya kerjasama keamanan yang dibentuk, dapat memberikan solusi untuk penciptaan keamanan regional Asia tenggara yang damai, terbuka terhadap kawasan maupun dunia internasional. Selain menciptakan keamanan regional dan menangani isu ancaman non-traditional. Komunitas. AMF juga bertujuan mempererat hubungan bilateral maupun multilateral khususnya ASEAN. Untuk mencakup wilayah maritime di Asia tenggara, ASEAN perlu mempetakan wilayah yang strategis serta rawan untuk ancaman, dan dengan solidaritas kebersamaan yang dibangun

Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan persoalan serius yang harus diatasi tidak hanya oleh Indonesia semata tetapi juga harus diatasi melalui kerja sama multilateral. Kerja sama secara multilateral, terutama dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, perlu dibangun dan dikembangkan untuk menangani kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dalam mengamankan perairan perbatasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan *illegal fishing* secara optimal.

Ketidakseriusan dan kepentingan nasional dari masing-masing negara tampaknya masih mewarnai penanganan kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Oleh karena itu, kerja sama multilateral yang lebih kuat perlu dibangun, dikembangkan, dan diimplementasikan secara nyata di lapangan oleh Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam mengatasi permasalahan ini.

AMF merupakan forum dialog instansi-instansi yang terkait dengan isu-isu maritime. Hingga saat ini, AMF telah dilaksanakan 6 (enam) kali. Sebagai pemrakarsa utama terbentuknya forum tersebut, Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan inauguras AMF pada tahun 2010 di Surabaya dan AMF ke-6 pada Oktober 2015 di Manado. Thailand bersedia menjadi tuan rumah Pertemuan AMF ke-2 di Pattaya pada tahun 2011 dan Filipina pada Pertemuan AMF ke-3 di Manila pada tahun 2012. Pertemuan AMF ke-4 telah dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Oktober 2013, sedangkan Pertemuan AMF ke-5 telah dilaksanakan di Da Nang, Vietnam pada Agustus 2014.

Meskipun hanya merupakan forum untuk bertukar pandangan dan dialog mengenai isu-isu maritim, namun sangat penting bagi ASEAN untuk menjaga tradisi dialog dan konsultasi ini. Tidak hanya terkait isu maritim, dialog dan konsultasi dalam ASEAN perlu terus dilakukan khususnya dalam membahas berbagai isu sensitif yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan kawasan.

Tidak adanya kesepakatan yang mengikat dalam AMF dan EAMF memberikan ruang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk berupaya saling

mengerti dan memahami posisi dan pandangan negara lain, tanpa harus melalui negosiasi yang alot. Selain itu, sebagai forum untuk testing the water dan membentuk wacana, AMF dan EAMF memberikan peluang bagi negara-negara untuk menyampaikan pandangan dan posisinya dengan argumentasi yang menyakinkan. Hal ini dapat dilakukan secara leluasa dalam AMF dan EAMF.

Melalui konferensi tersebut sangat perlu dilakukan dan diharapkan dengan adanya *ASEAN Maritime Forum* (AMF) untuk mengatasi permasalahan *illegal fishing* yang telah mengancam sumber daya perikanan Indonesia. Ancaman *illegal fishing* merupakan masalah utama bagi negara yang memiliki jumlah pantai yang banyak sehingga kejahatan transnasional seperti *illegal fishing*, *unregulated* dan *unreported*, menjadi masalah yang serius yang harus di tangani adanya AMF sebagai wadah yang meningkatkan hubungan kerjasama multilateral sehingga isu *illegal fishing* menjadi perhatian yang sangat serius dari Negara anggota konferensi AMF dan melakukan kerjasama dalam bidang kemaritiman, meskipun AMF baru dibentuk pada tahun 2010 di Surabaya dengan gagasan APSC (*ASEAN Political- Security Comunit*) sangat membantu indonesia dalam melakukan diplomasi multilateral dengan negara – negara yang memiliki permasalahan maritim yang sama dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memilki konsep dalam menanggulangi kasus *Illegal, Unreported dan Unregulated* (IUU) *Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia.

Dalam upaya Indonesia melakukan hubungan diplomasi multilateral yaitu dengan terbentuknya AMF sebagai forum diskusi mengenai masalah isu maritime

yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini Konsep yang di gagas oleh Indonesia merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam menanggulangi kasus illegal fishing tersebut, sebagaimana Indonesia mengusulkan bahwasannya dalam menanggulangi kasus illegal fishing membutuhkan konsep instrument yang mengikat, dengan ini kita tahu bahwa Indonesia membutuhkan kerjasama yang serius dengan negara – negara yang terkait dalam kasus illegal fishing, sehingga isu transnasional seperti illegal fishing menjadi salah satu isu penting yang harus di tangani bersama oleh negara anggota ASEAN.

Diplomasi multilateral yang di lakukan oleh Indonesia adalah tindakan yang sangat tepat, bahwasannya kejahatan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia bukan hanya satu negara saja yang terlibat dalam menangkap ikan secara illegal di perairan Indonesia, akan tetapi lebih dari dua negara yang sering melakukan kejahatan illegal fishing di perairan Indonesia, negara – negara tersebut merupakan negara yang memiliki stock ikan terbatas sehingga mereka dengan sadarnya memasuki wilayah Indonesia dan melakukan tindakan pencurian ikan, Karena Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat tinggi, sebab itu Indonesia harus akan peduli dengan kekayaan alam yang di miliki oleh Indonesia dengan cara melakukan hubungan kerjasama dengan negara – negara yang terlibat dalam kasus *illegal, unreported* dan *unregulated fishing* tersebut. Dan juga kesadaran dari masyarakat Indonesia pun juga diharapkan, peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama memantau dan mengawasi aktifitas *illegal fishing*. Bila masyarakat juga ikut berperan aktif maka kasus *illegal fishing* ini dapat berkurang dan teratasi.